

BAB III

PERAN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN BEBAS DAN KONDISI INDUSTRI SERTA PASAR DALAM NEGERI

Perdagangan Bebas Indonesia di Dunia Internasional

Dalam dunia internasional, Indonesia telah melakukan beberapa perjanjian perdagangan bebas, baik antar Negara ASEAN dengan Negara lain diluar ASEAN, penjelasan berikut tentang FTA yang telah Indonesia jalani :

I. ASEAN-CHINA FTA (ACFTA)

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan Cina telah menandatangani *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA, para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive*

Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Sedangkan protokol perubahan atas *Framework Agreement* tersebut ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua *Framework Agreement* ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 Indonesia sendiri telah meratifikasi

Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Terkait dengan ACFTA, salah satu peraturan nasional yang mengatur tentang ACFTA adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast ASEAN Nations and the People's Republic of China.*¹

1 Januari 2010, perjanjian perdagangan bebas antara China dan enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) yang lebih dikenal dengan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) telah dimulai. Konsekuensi dari adanya perjanjian tersebut adalah pembukaan pasar dalam negeri secara luas untuk dapat dimasuki barang-barang

¹ Agus Trihajiyo W. Kementerian perindustrian RI. "Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor

industri dari negara yang ikut dalam perjanjian tersebut. Tidak dapat dimungkiri posisi China yang sangat berpengaruh pada tataran perekonomian internasional membuat setiap negara ingin melaksanakan kerja sama dan berguru kepada mereka seperti ungkapan “belajarlah hingga ke negeri China”.²

a. Manfaat

- Terbukanya akses pasar produk pertanian (Chapter 01 s/d 08 menjadi 0%) Indonesia ke China pada tahun 2004.
- Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2005 yang mendapatkan tambahan 40% dari *Normal Track* (\pm 1880 pos tarif), yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.
- Terbukanya akses pasar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2007 yang mendapatkan tambahan 20% dari *Normal Track* (\pm 940 pos tarif), yang diturunkan tingkat tarifnya menjadi 0-5%.
- Pada tahun 2010, Indonesia akan memperoleh tambahan akses pasar ekspor ke China sebagai akibat penghapusan seluruh pos tarif dalam *Normal Track* China.

²ACFTA: Berkah atau Bencana bagi Indonesia? Dalam <http://economy.okezone.com/read/2010/02/23/279/306269/acfta-berkah-atau-bencana-bagi-indonesia>, diakses tanggal 11 maret 2012

- Sampai dengan tahun 2010 Indonesia akan menghapuskan 93,39%pos tarif (6.683 pos tarif dari total 7.156 pos tarif yang berada di *Normal Track*), dan 100% pada tahun 2012.³

II. ASEAN-KOREA FTA (AK-FTA)

Pada pertemuan KTT ASEAN-Korea pada bulan Nopember 2004 di Vientiane, Laos, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Korea menyepakati "*Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership between ASEAN and Korea, establishing ASEAN-Korea Free Trade Area*" sebagai landasan hukum bagi pembentukan ASEAN-Korea FTA. Framework Agreement dan Persetujuan Penyelesaian Sengketa AKFTA selanjutnya ditandatangani para Menteri Ekonomi ASEAN dan Korea pada tanggal 13 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan Persetujuan Jasa AKFTA ditandatangani pada saat KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 dan Persetujuan Investasi ASEAN Korea ditandatangani pada KTT ASEAN Korea pada bulan Juni 2009 di Jeju Island, Korea.⁴

AKFTA telah menjadi sebuah persetujuan FTA yang komprehensif dengan telah ditandatanganinya persetujuan-persetujuan dibidang perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. Salah satu peraturan nasional terkait Persetujuan

AKFTA adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive economic Co-Operation Among The Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.*⁵

a. Peluang

- Meningkatnya akses pasar produk ekspor nasional ke Korea Selatan dengan tingkat tarif yang relatif rendah dan pasar yang luas.
- Meningkatnya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua Negara melalui pembentukan "Aliansi Strategis".
- Meningkatnya ekspor produk unggulan Indonesia dalam menjangkau peluang pasar Korea.
- Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara.

b. Manfaat

- Akses pasar ekspor Indonesia ke Korea akan meningkat per implementasi akibat penghapusan tarif 70% pos tarif Korea dalam *Normal Track*.
- Produk-produk yang akan dihapuskan tarifnya pada waktu implementasi antara lain binatang hidup, ikan, sayuran, minyak sawit, produk

kimia, produk kertas, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit, produk kayu dan sebagainya.

- Akses pasar ekspor Indonesia ke Korea pada tahun 2008 akan meningkat akibat $\pm 95\%$ pos tarif Korea dalam Normal Track akan dihapus.
- Tahun 2010, seluruh pos tarif Korea dalam NT akan dihapuskan.
- Sensitive Track AKFTA mencapai 464 pos tarif (HS-6 digit) antaralain perikanan, beras, gula, wine-alcohol, produk kimia, tekstil, baja, komponen dan sebagainya.⁶

III. ASEAN-INDIA FTA (AIFTA)

Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India* pada bulan Oktober 2003. Setelah pernah dihentikan 2 kali, perundingan perdagangan barang telah dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2008. Persetujuan Perdagangan Barang AIFTA ditandatangani pada Pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN pada 13 Agustus 2009 di Bangkok. Sementara itu, perundingan perdagangan jasa dan investasi akan dimulai kembali pada bulan Oktober 2009 dan ditargetkan untuk dituntaskan pada akhir tahun 2010 sebagai sebuah *Single Undertaking*. Tingkat liberalisasi perdagangan barang dalam AIFTA tidak setinggi liberalisasi perdagangan barang yang dicapai antara ASEAN dengan mitra FTA

lainnya. Namun kedua pihak sepakat untuk meningkatkan komitmen liberalisasi melalui proses "review" setelah perjanjian diimplementasikan.

a. Manfaat

- Indonesia akan menikmati penghapusan bea masuk atas 70,14% postarip India (3.666 tariff lines) pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 79,35% pos tarif (4.145 tariff lines) pada tahun 2016.
- 94,75% dari ekspor Indonesia ke India (US\$ 2.6 milyar) akan menikmati peningkatan akses pasar dalam 10 tahun ke depan, termasuk CPO dan RPO yang merupakan komoditas utama Indonesia ke pasar India.
- India secara bertahap akan menurunkan bea masuk atas CPO dan RPO masing-masing dari 80% dan 90% menjadi 37,5% dan 45% selama periode 2009-2018. Hal ini merupakan keuntungan bagi Indonesia mengingat kedua produk andalan Indonesia tersebut akan memperoleh actual market access sampai dengan tahun 2018.
- Komoditas utama Indonesia ke pasar India-batubara-juga akan menikmati bea masuk 0%.
- Sebaliknya komitmen Indonesia memberikan perlindungan cukup signifikan bagi industri nasional karena hanya 46,17% pos tarif Indonesia yang akan dihapuskan pada tahun 2016 (meskipun sesuai kesepakatan akan di-review

- Jumlah penduduk India yang besar + 1 milyar jiwa merupakan potensipasar yang besar bagi produk Indonesia.
- Penguasaan teknologi informasi dan bidang farmasi dari India dapat dimanfaatkan sebagai proses transfer teknologi bagi para pelaku bisnis.
- Akan memacu pelaku bisnis pesaing Indonesia dalam memasuki pasar India.⁷ Sekitar empat ribu pos tarif akan dieliminasi bertahap pada 2013 hingga 2016. Tarif untuk sensitif produk akan berkurang hingga lima persen pada 2016 dan sebanyak 489 pos tarif produk sangat sensitif akan menyusul.⁸

IV. ASEAN-AUSTRALIA NEW ZEALAND FTA (AANZ-FTA)

Indonesia akhirnya meneken kesepakatan perdagangan bebas ASEAN Australia dan Selandia Baru (AANZFTA) pada pekan lalu. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai, perdagangan bebas ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru merupakan peluang dan tantangan memperluas pasar.⁹

Langkah awal pembentukan AANZFTA adalah dengan disepakatinya *Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit* pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos yang di dalamnya

⁷ ibid

⁸ Arinto Tri Wibowo, *Indonesia Juga Hadapi FTA Asean-India*, dalam 2012 http://us.bisnis.news.viva.co.id/news/read/118420-indonesia_juga_hadapi_fta_asean_india, diakses 26 april 2012

⁹ Herlina KD, *Teken AANZFTA, Indonesia harus tingkatkan daya saing*, dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/tekan-aanzfta-indonesia-harus-tingkatkan-daya-saing-1>, diakses

tertuang *Guiding Principles for Negotiation on ASEAN Australia and New Zealand Free Trade Area*. Hal tersebut dilanjutkan dengan proses negosiasi *ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA)* yang dimulai pada awal tahun 2005. Setelah melalui 15 putaran perundingan, Persetujuan AANZ-FTA diselesaikan pada bulan Agustus 2008. Untuk kemudian Persetujuan AANZ-FTA ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia dan New Zealand pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand.¹⁰

a. Manfaat

Dari segi perdagangan beberapa keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari AANZFTA antara lain adalah:

- 92.98% ekspor INA ke AUS (US\$ 2,4 billion) dan 78.79% ekspor INA ke NZ (US\$ 325 million) akan menikmati bea masuk 0% pada saat *Entry Into Force* (2009).
- 98.10% of ekspor INA ke AUS (US\$ 2,6 billion) dan 79.95% ekspor INA ke NZ (US\$ 330 million) akan menikmati bea masuk 0% mulai 2010.
- 100% ekspor INA ke AUS termasuk *Textile & Apparel and Footwear* senilai US\$ 51 million akan menikmati bea masuk 0% mulai tahun 2020.

¹⁰Agus Tjahjana W. Kementrian perindustrian RI, "Perkembangan Kerjasama ASEAN di Sektor Industri" Jakarta, 2012, hal 24

- Khusus untuk Textile & Apparel yang saat ini memiliki bea masuk antara 5-17.5%, AUS merespon permintaan INA dengan mempercepat penurunan bea masuknya dari 2012 ke 2009-2010 dan dari 2020 ke 2009/2010/2015.
- AUS memberikan komitmen penurunan bea masuk lebih cepat atas 25 produk otomotif kepada Indonesia, Malaysia dan Thailand.
- 81.12% ekspor INA ke NZ (US\$ 335 million) akan menikmati bea masuk 0% mulai 2012.
- Bea masuk untuk 263 produk Textile & Apparel yang merupakan kepentingan ekspor INA (saat ini dikenakan bea masuk antara 7.75-19% di NZ) akan dihapuskan lebih cepat yakni dari 2020 ke 2017, sementara 19 produk lainnya pada 2018.¹¹

V. ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP(AJCEP)

Landasan pembentukan perdagangan bebas ASEAN dan Jepang adalah *Joint Declaration of the Leaders of the Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan* yang ditandatangani pada tanggal 5 Nopember 2002, serta *Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan* yang ditandatangani tanggal 8 Oktober 2003. Dalam KTT ASEAN-Japan ke-8, Para Kepala Negara ASEAN dan Jepang menyetujui Perjanjian Kerjasama Ekonomi

¹¹ <http://www.wto.org/press/pr/030303ajcep.htm>

ASEAN-Jepang dan mulaidilakukan negosiasi pada bulan April 2005 dan ditandatangani pada bulanMaret dan April 2008 secara ad-referendum.Persetujuan telah berlaku efektifper 1 Desember 2008.¹²

Persetujuan AJCEP merupakan suatu persetujuan ekonomi antara ASEAN danJepang yang bersifat komprehensif serta mencakup bidang perdaganganbarang, jasa, investasi, SPS, TBT dan kerjasama ekonomi.Persetujuan AJCEP telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 50Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Pengesahan PersetujuanAJCEP.

a. Manfaat

- Akses pasar ekspor Indonesia ke Jepang akan meningkat:
 - I. sejak *entry into force* 7.287 pos tariff di Jepang akan bebas bea masuk atau 80% total pos tariff Jepang;
 - II. bebas bea masuk akan meningkat hingga 90%total pos tariff dalam 5 tahun kedepan.
- Dalam Persetujuan AJCEP jumlah *Exclusion List* Jepang sebesar 627 postarif atau lebih rendah dibandingkan Persetujuan IJEPA (886 pos tarif).
- Jepang memberikan komitmen yang lebih baik dalam PersetujuanAJCEP untuk sekitar 363 pos tarif dibanding komitmennya di IJEPAseperti ikan dan produk perikanan, sayuran, buah tropis, jus, kakao,makanan olahan, minyak

¹² <http://www.wto.org/press/pr/05/050405a.htm> "Perdagangan Kerjasama ASEAN di Selatan"

dan gas, kulit dan produk kulit, kayu lapis, kertas & produk kertas, alas kaki, perhiasan dsb.

- Meningkatkan investasi Jepang di Indonesia, saat ini Jepang termasuk salah satu negara investor terbesar Indonesia.
- Meningkatkan akses pasar Indonesia ke Jepang baik dari segi perdagangan barang maupun jasa (tenaga kerja).
- Terjadinya alih teknologi.

Manfaat lainnya dari Persetujuan AJCEP antara lain adalah:

- Indonesia memiliki *Exclusion List* yang lebih besar dibanding Jepang (854 pos tarif vs 627 pos tarif).
- Kriteria ROO yang lebih baik untuk general rules yaitu RVC 40% atau *Change in Tariff Classification* (CTC) dalam 4 digit.
- Mencakup bagian DSM, SPS dan TBT yang tidak terdapat dalam IJEPA.
- Menyediakan program-program kerjasama ekonomi dan kegiatan *capacity building*¹³

B. Perkembangan Industri domestik dalam negeri

Sepanjang sejarah kemerdekaan selama lebih dari enam dasawarsa, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini

Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indonesia juga memainkan peran yang makin besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati urutan ekonomi ke-17 terbesar di dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, dan berbagai kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. Hal ini tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia di saat peringkat negara-negara lain justru mengalami penurunan. Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan.

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia dalam dinamika regional dan global. Secara geografis Indonesia terletak di jantung pertumbuhan ekonomi dunia. Kawasan Timur Asia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata kawasan lain di dunia. Ketika tren jangka panjang (1970 – 2000) pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, tren pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Asia menunjukkan peningkatan

Sejak 2008, pertumbuhan ekspor Negara berkembang yang didorong oleh permintaan negara berkembang lainnya meningkat sangat signifikan (kontribusinya mencapai 54 persen). Hal ini berbeda jauh dengan kondisi tahun 1998 yang kontribusinya hanya 12 persen. Pertumbuhan yang kuat dari Cina, baik ekspor maupun impor memberikan dampak yang sangat penting bagi perkembangan perdagangan regional dan global. Impor Cina meningkat tajam selama dan setelah krisis ekonomi global 2008. Di samping itu, konsumsi Cina yang besar dapat menyerap ekspor yang besar dari negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia.

Percepatan transformasi ekonomi yang dirumuskan dalam MP3EI ini menjadi sangat penting dalam rangka memberikan daya dorong dan daya angkat bagi daya saing Indonesia. Dengan melihat dinamika global yang terjadi serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dalam kerangka MP3EI, Indonesia perlu memosisikan dirinya sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global.

Potensi dan Tantangan Indonesia

Potensi Indonesia

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial, sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus membaik adalah potensi daya saing yang luar biasa. Keadaan Demografi Umur Penduduk Indonesia, Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif. Pada kurun waktu 2020 – 2030, penurunan indeks (ratio) ketergantungan Indonesia (yang sudah berlangsung sejak tahun 1970) akan mencapai angka terendah. Implikasi penting dari kondisi ini adalah semakin pentingnya penyediaan lapangan kerja agar perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk usia produktif. Lebih penting lagi, bila tingkat pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, produktivitas perekonomian negara ini sesungguhnya dalam kondisi premium, dimana hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan maupun perluasan pembangunan ekonomi. Daya beli masyarakat dan pasokan energi. Saat ini kedua hal tersebut tengah jadi unggulan Indonesia. Tak heran, kemudian banyak investor melirik Indonesia. Bahkan, Indonesia termasuk satu dari 16 negara prioritas investasi saat ini.¹⁴

2. Sumber Daya Alam

Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan (hasil tambang dan

¹⁴Daya Beli Masyarakat Naik. Citibank Atur Strategi dalam SWA.co.id diakses 26 april 2012

mineral). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah.

Potensi Sumber Daya Alam Indonesia Ukuran Kunci

- Sumber daya melimpah untuk energi berbasis gas dan industri petrokimia
- Angka ini tidak termasuk Gas Non-Konvensional; dari *Coal Bed Methane* (CBM) dan *Coal Gassification* Dengan asumsi 40% layak dikembangkan 12 GW. Hingga saat ini, baru 1.200 MW dikembangkan Sekitar 165 TCF cadangan dengan tingkat produksi +3 TCF per tahun Gas Alam Batubara Panas Bumi Minyak Kelapa Sawit Kakao Timah Nikel Bauksit Eksportir terbesar kedua di dunia Penyimpan 40% sumber daya dunia (terbesar di dunia)

Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi dan makanan-minuman.

3. Letak Geografis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasar terbesar di

dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu *Sea Lane of Communication* (SLoC), yaitu Selat Malaka, di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global

Berdasarkan data *United Nations Environmental Programme* (UNEP, 2009) terdapat 64 wilayah perairan *Large Marine Ecosystem* (LME) di seluruh dunia yang disusun berdasarkan tingkat kesuburan, produktivitas, dan pengaruh perubahan iklim terhadap masing-masing LME. Indonesia memiliki akses langsung kepada 6 (enam) wilayah LME yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, yaitu: LME 34 – Teluk Bengala; LME 36 – Laut Cina Selatan; LME 37 – Sulu Celebes; LME 38 – Laut-laut Indonesia; LME 39 – Arafura – Gulf Carpentaria; LME 45 – Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industry perikanan tangkap sangat besar.¹⁵

4. Daya Saing

Indonesia, bersama dengan lainnya yang muncul dengan kekuatan demokratis, seperti Brazil, India dan Turki, membawa kemampuan dan legitimasi kepada upaya internasional, yang menjadikan Indonesia pemain penting bagi kekuatan global saat ini termasuk Amerika Serikat, Eropa, Cina dan Jepang. Kekuatan ekonomi Indonesia mulai dilirik dunia dalam empat tahun terakhir ini. Bahkan, perekonomian Indonesia

¹⁵ *United Nations Environmental Programme* (UNEP) 2009

masuk dalam peringkat ke-17 dunia sehingga Indonesia masuk G-20.¹⁶ Hal ini disebabkan kemampuan Indonesia bertahan di tengah krisis yang menghadang dunia.

Tantangan

Walaupun potensi yang banyak tersebut merupakan keunggulan Indonesia, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Harus pula dipahami bahwa upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat. Namun begitu, upaya tersebut harus dimulai melalui upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai titik awal menuju Indonesia yang lebih merata.

¹⁶ *Posisi Ekonomi Indonesia Beringkat 17 Dunia*, dalam pikiran rakyat.com, diakses 12 Mei 2012

Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapatkan perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait dengannya.

Kualitas sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan Indonesia. Saat ini sekitar 50 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya sekitar 8 persen yang berpendidikan diploma/sarjana. Kualitas sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan, kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.

Indonesia sedang menghadapi urbanisasi yang sangat cepat. Jika pada tahun 2010 sebanyak 53 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, maka BPS memprediksi bahwa pada tahun 2025 penduduk di kawasan perkotaan akan mencapai 65 persen. Implikasi langsung yang harus diantisipasi akibat urbanisasi adalah terjadinya peningkatan pada pola pergerakan, berubahnya pola konsumsi dan struktur produksi yang berdampak pada struktur ketenagakerjaan meningkatnya

konflik penggunaan lahan, dan meningkatnya kebutuhan dukungan infrastruktur yang handal untuk mendukung distribusi barang dan jasa.

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih berkisar pada angka 32,53 juta penduduk di tahun 2009, atau masih sekitar 14,15% penduduk negeri ini. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis Kemiskinan di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta atau 13,33 %, turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta atau 14,15 %.¹⁷ Namun indeks ini masih dihitung dengan indeks standar PBB. Jika digunakan standar Indonesia, yaitu dengan pendapatan sekitar Rp200.262,00 per bulan, atau sekitar Rp6.675,00 per hari. Kita akan menemukan angka yang jauh lebih besar jika kita mengikuti PBB dalam memasang threshold kemiskinan yang ada. Sekalipun persentase jumlah masyarakat miskin dapat ditekan, namun hal ini masih telak dan ironis mengingat negeri kita digadang-gadang sebagai negeri yang kaya.

Pengangguran di Indonesia pun serupa. Angka pengangguran yang besar, sekitar 9 – 10 juta jiwa, atau sekitar 10% usia produktif Indonesia, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mayoritas pengangguran disebabkan karena minimnya keahlian, bahkan ada yang sampai tidak punya keahlian dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Data historis menunjukkan bahwa ada

¹⁷Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2010 dalam <http://www.bps.go.id>, diakses 26 april 2012

peningkatan drastis dari tahun 2008 ke 2009 terhadap pengangguran yang belum pernah sekolah/tamat SD.¹⁸

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim global. Beberapa indikator perubahan iklim yang berdampak signifikan terhadap berlangsungnya kehidupan manusia adalah: kenaikan permukaan air laut, kenaikan temperatur udara, perubahan curah hujan, dan frekuensi perubahan iklim yang ekstrem. Demikian pula, pengaruh kombinasi peningkatan suhu rata-rata wilayah, tingkat presipitasi wilayah, intensitas kemarau/banjir, dan akses ke air bersih, menjadi tantangan bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia dalam menghasilkan lada putih, buah pala, kayu lapis, nenas dan LNG. Indonesia adalah archipelago 13.000 pulau yang memiliki perairan laut seluas 60 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 81.000 kilometer. Tapi Indonesia juga mengimpor 2,5 juta ton garam per tahun dari Australia (Fadel Muhammad dalam Kuliah Studium Generale, 2011). Dari wilayah yang seluas itu, potensi perikanan tangkap di Indonesia mencapai 6,26 juta ton pertahun. Namun Indonesia juga mengalami kebocoran potensi perikanan sejumlah jutaan dolar per tahun. Indonesia juga memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia yang menyumbang sekitar 10% dari total luas hutan dunia. Tapi Indonesia

¹⁸Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 dalam <http://www.bps.go.id> diakses 26 april

juga terus kehilangan jumlah hutan seluas 2 buah lapangan bola per hari dan hasil kayunya entah ada dimana (WWF, 2007).¹⁹

Berjuta sumber daya yang belum optimal terasa oleh berjuta rakyat merupakan pekerjaan rumah bagi bangsa untuk membuktikan rasa syukur terhadap Sang Pencipta. Menilik posisi pergerakan ekonomi Indonesia, pada masa orde baru Indonesia masih didominasi oleh kondisi *given economy*. Kondisi ini dicirikan oleh didominasinya pemasukkan negeri ini dari eksploitasi bahan alam, atau olahan alam dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan. Namun untuk menjadi negeri yang maju, Indonesia takkan mampu terus mengandalkan pemanfaatan alam saja. Indonesia perlu bergerak lebih cepat dan mengarah ke arah *knowledge based economy*, saat ilmu pengetahuan dan penelitian menjadi penyokong peningkatan produktifitas ekonomi nasional. Pemerataan infrastruktur dan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam konstelasi nusantara perlu dilakukan. Kedua hal ini menjadi penting dalam rangka melakukan percepatan peningkatan daya saing